

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup sejahtera adalah dambaan setiap keluarga dan menjadi dambaan setiap keluarga untuk membantu seluruh keluarga guna mewujudkan cita-cita luhur tersebut, sebagai manifestasi amanat konstitusi “untuk memajukan kesejahteraan umum tetapi realitasnya saat ini masih banyak dijumpai keluarga yang berada dalam kondisi tidak berdaya, terpuruk dalam kemiskinan. Mereka menghadapi banyak hambatan dalam usaha mencapai kesejahteraan baik karena disebabkan oleh factor-faktor internal keluarga, maupun faktor-faktor lain dari lingkungan keluarga. Pusat perhatian pembangunan tidak hanya pada model fisik (Kapital dan sumber daya alam tetapi juga model manusia (sumber daya manusia). Namun tidaklah berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak diperhatikan dalam proses pembangunan, tetapi upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik perlu mendapat tempat dalam pembangunan.

Berbicara masalah pembangunan menyinggung masalah kependudukan menurut Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial (2010:23), dewasa ini jumlah penduduk di Indonesia 238 Juta jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk yang masih tinggi yaitu sekitar 1,49% pertahun. Kesepakatan global yang dideklarasikan di PBB (Newyork) pada tahun 2009 oleh Negara-negara di dunia termaksud Indonesia telah meratifikasi tujuan pembangunan bahwa pembangunan kependudukan dengan tidak hanya dipahami secara sempit dalam

arti sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi saja, namun sasarannya sudah lebih luas lagi untuk mencapai kesejahteraan rakyat, baik dari segi fisik maupun non fisik. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kebijakan kependudukan saat ini merupakan bagian integral dan kebijakan pembangunan secara keseluruhan yang harus diletakkan dalam rangka kebijakan kependudukan jangka panjang.

Millennium Development Goals (MDGs) mencakup delapan tujuan pokok, yaitu : 1) Penghapusan kemiskinan dan kelaparan; 2) Pendidikan dasar yang universal; 3) Promosi keadilan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) Penurunan angka kematian anak; 5) Peningkatan kesehatan ibu; 6) Penanggulangan HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain; 7) Pelestarian lingkungan hidup, dan; 8) Kemitraan global untuk pembangunan. Dari kedelapan tujuan pokok itu telah mengindikasikan bahwa sebagian besar dari MDGs tersebut sangat berkaitan dengan penanggulangan masalah-masalah kependudukan termasuk didalamnya Keluarga Berencana.

Pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai peningkatan kualitas SDM. Dasar penanganan masalah kependudukan adalah Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang mengamankan bahwa kewenangan dan urusan BKKBN tidak hanya terbatas pada masalah yang berhubungan dengan pembangunan keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera namun juga menyangkut masalah yang berhubungan dengan pembangunan kependudukan. Kepanjangan BKKBN telah berubah menjadi Badan

kependudukan dan keluarga Berencana, dengan mengemban mandat melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BKKBN mempunyai fungsi perumusan kebijakan nasional, penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), pelaksanaan advokasi dan koordinasi, penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan, bimbingan, fasilitasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Dengan terbitnya peraturan presiden nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional maka akan memperkuat penanganan masalah kependudukan di Indonesia.

Program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana merupakan Program Lintas Sektor Penyerasian kebijakan antar bidang dan antar sektor menjadi perhatian bersama. Pembangunan kependudukan tidak lagi dipahami secara sempit, hanya sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi saja, akan tetapi sasarannya jauh lebih luas untuk mencapai kesejahteraan rakyat, baik dalam fisik maupun non fisik. Hal tersebut berarti bahwa kebijakan kependudukan merupakan bagian integral dan kebijakan pembangunan secara keseluruhan, dan kebijakan kependudukan harus diletakkan dalam rangka kebijakan kependudukan jangka panjang sebagaimana merupakan kesepakatan global yang dideklarasikan di PBB (New York) pada tahun 2000, Negara-negara di dunia (termasuk Indonesia) telah meratifikasi tujuan pembangunan pada millennium.

Sejak Program KB Nasional dikembangkan tahun 1971 s/d 2009 berhasil mencegah lebih dari 100 juta kelahiran, ini tentunya memberikan dampak positif terhadap penekanan laju pertumbuhan penduduk dengan melihat daya dukung dan daya tampung di daerah, keberhasilan program KB saat ini tidak terlepas dari dukungan dan peran semua pihak yang peduli dengan kemaslahatan umat terutama dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

Hasil Sensus Data Kependudukan Indonesia (SDKI) Provinsi Gorontalo khususnya (*total fertility rate*/TFR) 2007 2,6 turun dibanding SDKI 2003 2,8 (kecenderungan pola keluarga di Provinsi Gorontalo untuk memiliki jumlah anak yang ideal 2. Hal ini mengindikasikan terjadinya pola pergeseran kecenderungan untuk memiliki jumlah anak yang ideal yang diidam-idamkan oleh setiap keluarga di Gorontalo.

Begitu halnya dengan pola pemakaian kontrasepsi yang rasional di daerah ini juga mengalami peningkatan yang cukup berarti *Contracepsi Prevalentie Ratio* berdasarkan SDKI 2007 60,1 % naik dari SDKI 2003 yang hanya sebesar 52,0 % hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat di Gorontalo untuk memenuhi kebutuhan KB semakin meningkat dan KB itu merupakan kebutuhan saat ini. Bila melihat keluarga-keluarga yang belum berkeinginan untuk memiliki anak dan tidak diikuti dengan pemakaian KB juga mengalami penurunan *Unmet Need* berdasarkan SDKI 2007 6,6 % turun dari SDKI 2003 11 % ini menunjukkan kebutuhan akan KB bagi Pasangan Usia Subur yang tidak terlayani semakin meningkat di daerah ini.

Keberadaan Median usia kawin produktif berdasarkan SDKI 2007 20,3 tahun meningkat dari SDKI 2003 20,2 tahun hal ini berarti pemahaman masyarakat akan PUP semakin meningkat walaupun tren kenaikannya masih kecil. Penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 238 juta jiwa, ini tentunya menjadi tantangan sekaligus peluang bila dilakukan perencanaan dan pelaksanaan Program dilapangan dengan sebaik-baiknya.

Hasil Sensus Penduduk 2010(angka sementara)provinsi gorontalo sebanyak 1.038.585 jiwa(sumber BPS Gorontalo)bila dibandingkan dengan sensus penduduk 2000 mengalami peningkatan dari SP2000 yang mencapai 830.184 jiwa dan bila dibandingkan dengan sensus penduduk antar sensus.Dan SUPAS 2005 yang mencatat sebanyak 920.015 jiwa ,melihat trend dalam satu dasawarsa terakhir ini penduduk terus mengalami kenaikan tentunya perlu diwaspadai dengan melakukan pola pendekatan dan pelayanan yang komprehensif dan sinergis dengan semua stakeholder.

Dasar penanganan masalah kependudukan adalah Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, hal ini memberikan tuntunan kepada pemangku kebijakan di daerah untuk bisa mendapatkan program secara lebih fokus dan terarah.Dalam undang-undang tersebut mengamanatkan berhubungan dengan pembangunan keluarga Berencana Nasional dan Keluarga Sejahtera namun juga menyangkut masalah yang berhubungan dengan Pembangunan Kependudukan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan mengemban mandat melaksanakan pengendalian penduduk dan

menyelenggarakan program KB nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BKKBN mempunyai fungsi perumusan kebijakan nasional, penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), pelaksanaan advokasi dan koordinasi, penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan, bimbingan, fasilitasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

Pembangunan kependudukan tidak lagi dipahami secara sempit, hanya sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi saja, akan tetapi sarannya jauh lebih luas untuk mencapai kesejahteraan rakyat, baik dalam fisik maupun non fisik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar dari MDGs tersebut sangat berkaitan dengan penanggulangan masalah-masalah kependudukan. Suatu kemustahilan untuk mengentaskan kemiskinan dan mencapai tujuan MDGs lainnya tanpa memperdulikan dan memberikan prioritas pada penanganan masalah-masalah kependudukan termasuk KB.

Di sisi lain, kesepakatan internasional baik yang dituangkan dalam Millenium Development Goals (MDGs) maupun berbagai konferensi internasional tentang pembangunan menyebutkan bahwa kemiskinan bukanlah merupakan persoalan ekonomi semata. Kemiskinan terkait dengan berbagai masalah besar lainnya seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu disepakati bahwa pemberantasan kemiskinan harus melalui pendekatan yang komprehensif. Pendekatan tersebut memerlukan kebijakan dalam upaya pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, pelestarian

lingkungan, serta pengembangan system pengamanan sosial yang memadai yang merupakan rangkaian dari pembangunan berkelanjutan.

Millenium Development Goals (MDG's) atau tujuan pembangunan millennium adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, kelestarian lingkungan hidup, serta membangun kemitraan global dalam pembangunan.

Adapun pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Provinsi Gorontalo, banyak mengalami kemajuan dalam hal pencapaian Akseptor Baru maupun Pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa. Dari KKP Peserta KB baru yang ditargetkan oleh BKKBN Pusat sejumlah 40.207 berhasil dicapai 50.447 Akseptor KB Baru atau 125,5 %. keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras serta perhatian dari pimpinan dan dukungan segenap stakeholder terkait baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Capaian peserta KB tahun 2010 yang berjumlah 50.447 terdiri dari PB Wanita berjumlah 46,050 (123,1%) dan PB Pria berjumlah 4.397 (157,8%) (Gorontalo Post. 2008;6)

Penduduk merupakan faktor pertama dan utama dalam tatanan demografi ketatanegaraan, bila hal ini tidak mendapat perhatian yang saksama oleh semua pihak akan berdampak buruk terhadap masa depan generasi berikutnya, karena

penduduk yang besar dan diikuti dengan kualitas yang baik tentu akan menjadi modal pembangunan, sebaliknya penduduk yang besar tapi tidak berkualitas itu merupakan beban pembangunan dan perlu kita lihat.

Provinsi Gorontalo masih mengalami persoalan yang serius dengan kemiskinan. Hasil pendataan keluarga tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Gorontalo berjumlah 1.038,585 dan KK berjumlah 277.244 keluarga dan yang merupakan keluarga prasejahtera berjumlah 68.631 atau 24,75% dibandingkan dengan hasil pendataan 2009 berjumlah 76.071 atau 27.95% berarti hanya mengalami penurunan sebesar 11%. Kondisi kependudukan yang ada, baik dalam arti jumlah dan kualitas menjadi tantangan pembangunan yang dihadapi oleh provinsi Gorontalo saat ini.

Permasalahan yang dihadapi dimana angka kelahiran total perwanita (*total fertility rate/TFR*) bagi Provinsi Gorontalo masih di atas rata-rata pusat. Kondisi kependudukan saat ini jumlah dan kualitas maupun persebaran merupakan tantangan yang berat bagi bangsa Indonesia. Situasi dan kependudukan merupakan suatu fenomena yang memerlukan perhatian dan penanganan secara saksama lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan, salah satu upaya yang telah dan perlu terus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana.

Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, mengamanatkan pencapaian sasaran peningkatan kualitas SDM. Untuk mencapai kondisi tersebut, RPJMN 2010-2014

diarahkan kepada pengendalian kuantitas penduduk melalui 3 prioritas utama yaitu: (1) Revitalisasi Program KB; (2) Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, dan (3) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.

Untuk mencapai prioritas peningkatan kualitas SDM Provinsi Gorontalo, salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan dengan berhasil adalah revitalisasi Program KB seperti tertuang pada rencana kerja pemerintah (RKP) 2010 melalui sasaran dan kebijakan program KB Nasional 2010.

Dalam bidang kesehatan, pemahaman ibu-ibu menjadi persoalan yang cukup rumit tentang KB, angka kematian ibu terutama kematian ibu hamil dan melahirkan masih cukup tinggi sekitar 228 / 100.000 kelahiran, demikian juga untuk angka kematian bayi masih sekitar 34 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab tingginya angka kematian bayi dan ibu yang cukup tinggi tersebut antara lain karena masih kurangnya pemahaman ibu-ibu tentang KB. Kasus gizi buruk masih terus terjadi terutama pada anak balita diperkirakan 1,5 juta. Sementara itu tingkat pendidikan penduduk Indonesia juga masih memprihatinkan, sekitar 60% di Kabupaten Pohuwato hanya tamat SD atau lebih rendah. Hal tersebut cukup memberikan kontribusi terhadap rendahnya pemahaman ibu-ibu tentang program KB.

Di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato angka kematian ibu terutama kematian ibu hamil dan melahirkan masih cukup tinggi sekitar 67 pertahun dan demikian juga untuk angka kematian bayi masih sekitar 134 pertahun. (Gorontalo Post. 2008:9)

Berangkat dari latar belakang di atas, judul penelitian ini adalah pemahaman ibu-ibu tentang program keluarga berencana (Studi Kasus di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan penelitian ini adalah bagaimana pemahaman ibu-ibu tentang program keluarga berencana (Studi Kasus di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman ibu-ibu tentang program keluarga berencana di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Mengembangkan potensi untuk penelitian karya ilmiah, khususnya bagi pribadi peneliti maupun kalangan akademisi, dalam memberikan informasi kepada dunia pendidikan akan pentingnya pemahaman ibu-ibu tentang program keluarga berencana di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

2. Secara Praktis

1. Dapat memberi manfaat bagi pemahaman ibu-ibu tentang program keluarga berencana di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

2. Sebagai media informasi ilmiah demi kepentingan perkembangan ilmu pendidikan luar sekolah tentang program keluarga berencana di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.
3. Sebagai bahan kajian dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait tentang program keluarga berencana di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.
4. Sebagai masukan bagi para akademisi dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang program keluarga berencana di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.
5. Sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian-penelitian lanjutan, khususnya penelitian tentang program keluarga berencana di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.